

# **Implementasi Program Klinik Usaha Mikro (KUM) Di Kabupaten Sidoarjo**

**Oleh:**

**Rury Hilda Pandu Winata**

**Dosen Pembimbing : Hendra Sukmana, S.AP., M.KP**

**Administrasi Publik**

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

**Juli 2025**



# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Klinik Usaha Mikro (KUM) di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Penetapan informan dalam penelitian ini melalui purposive sampling, yang terdiri dari Customer Service Klinik Koperasi Usaha Mikro dan Pelanggan Klinik. Teknik pemilihan informan yang dipakai pada riset berikut ialah dengan cara purposive sampling yaitu teknik. Model analisis data yang dilakukan melalui model analisis Miles Huberman (1994:12) yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian ini dilihat dari 4 indikator Implementasi yaitu pertama komunikasi, Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan upaya nyata dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi dalam implementasi pelayanan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro dengan melakukan sosialisasi serta seminar kepada para pelaku usaha binaan yang ada pada Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Kedua sumber daya, Klinik Koperasi Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo hanya memiliki 2 sumber daya manusia dan terdapat kekurangan anggaran pada program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo. Ketiga disposisi, Klinik Koperasi dan Usaha Mikro telah memberikan pelayanan dengan baik kepada para pelaku binaan usaha UMKM tetapi terhalang oleh kinerja sistem yang terkadang lambat. Keempat, struktur birokrasi, Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki standart operasioan prosedur yang mudah dan berjalan dengan efisien sehingga memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan UMKM nya di Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sehingga para pelaku usaha binaan dapat dengan mudah memahami standar operasional prosedur yang telah disediakan oleh Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

**Kata Kunci:** Implementasi Program; Klinik Koperasi Usaha Mikro (KUM)

# PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang lebih menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, yang mendorong tumbuhnya berbagai jenis usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terbukti mampu bertahan saat krisis ekonomi 1998. Setiap tahun, UMKM terus berkembang dan menjadi pilar utama yang mendorong peningkatan kesejahteraan, pendapatan nasional, serta pengurangan pengangguran. Di era digital saat ini, pelaku UMKM dituntut untuk terus berinovasi dan bersaing, sehingga dibutuhkan dukungan program pemerintah agar UMKM semakin tumbuh dan berdaya saing.

Sesuai UU No. 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha. Keberhasilan UMKM dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan motivasi pelaku usaha. Di Kabupaten Sidoarjo, UMKM berkembang pesat di berbagai sektor seperti tas kulit, sandal, *handcraft*, *fashion*, serta makanan dan minuman. Pemerintah daerah mendukung melalui pembinaan dan fasilitas, termasuk pendirian Klinik Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) sejak 2017 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Klinik ini memberikan layanan konsultasi, akses pembiayaan, informasi usaha, dan sertifikasi seperti SKUM, KURDA, BBM, NIB, serta sertifikasi halal. Program unggulan seperti Sedekah Ilmu, Warung Rakyat Renovasi, dan Inkubasi Bisnis terus dijalankan meski terbatas anggaran, dengan layanan gratis bagi pelaku UMKM.

# PERMASALAHAN YANG DITEMUI

Berikut ini adalah data jumlah pelaku usaha Klinik KUM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021-2024 :

**Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha Klinik Koperasi dan Usafasilha Mikro Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Pelaku Usaha
1.	2021	900 Pelaku Usaha
2.	2022	800 Pelaku Usaha
3.	2023	690 Pelaku Usaha

Sumber: Diolah Penulis Dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2024).

Data menunjukkan jumlah pelaku usaha di Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo menurun signifikan, yakni 100 usaha pada 2021–2022 dan 110 usaha pada 2022–2023. **Penurunan ini disebabkan kurangnya anggaran**, sehingga sosialisasi tidak optimal dan banyak masyarakat belum mengetahui program KUM. Padahal, layanan KUM gratis dan berpotensi membantu pengembangan UMKM. Kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama menurunnya partisipasi pelaku usaha tiap tahun. Berdasarkan observasi menunjukkan beberapa kendala dalam implementasi Program Klinik Usaha Mikro (KUM) di Kabupaten Sidoarjo, yaitu terbatasnya SDM karena hanya dua orang yang menangani program ini, minimnya anggaran dari pemerintah, serta kurangnya sosialisasi sehingga banyak masyarakat belum mengetahui program tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis meneliti “Implementasi Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) di Kabupaten Sidoarjo” dengan fokus pada indikator implementasi Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

# PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mariyati Endah (2019)	Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Masyarakat Di Kecamatan Tuminting Kota Manado	Hasil penelitian mengatakan bahwa implementasi pemberdayaan UMKM di Tuminting kurang efektif karena komunikasi tidak merata, SDM belum optimal, dan keterbatasan modal masih menjadi kendala.
2.	Fahrezi (2022)	Implementasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Program Pelatihan dan Bantuan Alat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UMKM di Karawang sudah baik, namun implementasinya terbatas akibat anggaran, sehingga bantuan hanya menyasar UMKM yang sudah memiliki produk.
3.	Arniati AS (2019)	Implementasi Program Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Maros	Hasil penelitian mengatakan bahwa pemberdayaan UMKM di Maros berjalan cukup baik, didukung kebijakan perizinan dan bantuan, meski terkendala pada kuantitas SDM dan masih perlu penyesuaian dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

# METODE PENELITIAN

<b>Jenis Penelitian</b>	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif disini menguraikan data yang diperoleh secara mendalam dan luas serta dilakukan secara luas dalam penjabarannya.
<b>Fokus Penelitian</b>	Fokus penelitian ini akan diukur berdasarkan teori implementasi menurut Edward III yang memiliki indikator : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.
<b>Lokasi Penelitian</b>	Pada penelitian ini berlokasi di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena bisa dijadikan sebagai bahan literasi bagi masyarakat mengenai Implementasi Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Di Kabupaten Sidoarjo.
<b>Teknik Penentuan Informan</b>	Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, pada penelitian ini informan yang peneliti pilih antara lain : Kepala Bidang Program Klinik KUM Bapak Wildan, dan Sekertaris bidan KUM ibu Devi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
<b>Sumber Data</b>	Data Primer, diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi
	Data Sekunder, dikumpulkan secara tidak langsung dari berbagai sumber seperti jurnal, literatur, dan media massa.
<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
<b>Teknik Analisis Data</b>	Pada teknik analisis data oleh Miles dan Huberman (1994:12) yang meliputi: wawancara, observasi, dan dokumentasi.



# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk Program Klinik Usaha Mikro (KUM) di Kabupaten Sidoarjo. Menurut teori Edward III, efektivitas implementasi dipengaruhi oleh kejelasan, konsistensi, dan ketepatan informasi yang disampaikan. Klinik KUM telah mengoptimalkan komunikasi melalui media sosial, WhatsApp, dan kegiatan langsung seperti *Sosialisasi Sedekah Ilmu* sejak 2017.

Penyampaian awal dilakukan secara lisan, namun kini didukung oleh media daring dan pembentukan koordinator kecamatan. Klinik juga berperan sebagai pusat layanan konsultasi UMKM, memastikan seluruh pelaku usaha binaan dapat memahami informasi program secara merata. Dengan demikian, komunikasi yang kuat dan terstruktur menjadi fondasi penting dalam pencapaian tujuan program KUM.

**Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi di ruang Klinik KUM Kabupaten Sidoarjo**



Sumber: Diolah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2025)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, ketersediaan SDM dan anggaran sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Klinik Usaha Mikro Sidoarjo saat ini hanya memiliki dua orang SDM aktif, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang lebih lengkap. Meski terbatas, mereka tetap berkomitmen melayani pelaku UMKM melalui konsultasi dan pemberdayaan.

**Tabel 2. Struktur Organisasi Klinik Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo**

Klinik Usaha Mikro		
No.	Nama	Jabatan
1.	Achmad Wildan	Customer Service (CS)
2.	Tutik Handayani	Tenaga Pendamping UM

Sumber: Diolah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2025)



# HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak 2021, Klinik Usaha Mikro tidak lagi menerima anggaran dari pemerintah daerah, padahal anggaran merupakan aspek penting dalam kelancaran program. Kegiatan kini berjalan melalui program non-anggaran seperti “Sedekah Ilmu” yang didukung sponsor, termasuk Bank Delta Arta. Sebelumnya, pada 2020 dan 2021 tersedia anggaran masing-masing Rp 50 juta dan Rp 100 juta. Setelah itu, program dialihkan ke bidang pemberdayaan Dinas Koperasi. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada keberlangsungan program dan jumlah SDM, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak optimal sebagaimana dijelaskan dalam teori Edward III.

**Tabel 3. Data Anggaran Klinik Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020-2021**

NO	Tahun	Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran
1.	2020	Pendampingan Klinik Usaha Mikro	Rp 50.000.000
2.	2021	Jasa Konsultasi	Rp 100.000.000

Sumber: Diolah dari Dinas Koperasi dan Usana Mikro Kabupaten Sidoarjo (2025)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## C. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat memengaruhi efektivitas implementasi, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara. Menurut Edward III, implementasi efektif menuntut pemahaman dan kemampuan pelaksana. Dalam konteks Klinik Koperasi dan Usaha Mikro di Sidoarjo, komitmen pelaksana terlihat dalam layanan konsultasi dan pelatihan, meski hanya didukung dua SDM inti.

Namun, kendala teknis dan administrasi seperti sistem digital yang lambat menjadi hambatan. Meski demikian, kepuasan pelaku usaha tetap tinggi terhadap layanan yang diberikan. Agar program berjalan optimal, diperlukan sinergi antara komitmen pelaksana, efisiensi teknis, serta dukungan pemerintah dalam perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas pelaksana.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## D. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, implementasi kebijakan bergantung pada struktur organisasi dan prosedur operasional standar (SOP) yang sistematis. Dalam program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Kabupaten Sidoarjo, SOP disusun dengan alur pelayanan yang jelas dan tidak berbelit, mulai dari pendaftaran hingga konsultasi, serta tanpa biaya. Pembagian tugas antar tim juga sudah terstruktur dan dijalankan dengan komitmen tinggi. Hal ini membuktikan bahwa implementasi program telah berjalan efektif sesuai teori Edward III, dengan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

**Tabel 4. Standart Operasional Prosedur Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo**

Urutan	SOP Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sidoarjo
Pertama	Pemohon datang ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sidoarjo dan membawa persyaratan yang dibutuhkan, diantaranya: KTP (wilayah Sidoarjo), Foto produk (apabila telah memiliki usaha).
Kedua	Pemohon mengisi buku tamu, kemudian di arahkan ke ruang klinik konsultasi Usaha Mikro untuk menyerahkan berkas persyaratan.
Ketiga	Pemohon mengisi form yang telah disediakan (waktu yang dibutuhkan selama 1 jam dan tidak dipunggut biaya, GRATIS)
Keempat	Pemohon akan dihubungi melalui whatsapp apabila kegiatan akan dilaksanakan.

Sumber: Diolah dari Dinas Koperasi dan Usana Mikro Kabupaten Sidoarjo (2025)

# KESIMPULAN

Dari adanya pembahasan dan uraian diatas mengenai Implementasi Program Klinik Koperasi Usaha Mikro (KUM) di Kabupaten Sidoarjo maka dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dalam aspek komunikasi, Klinik Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi melalui media sosial yang tersedia. Informasi serta layanan yang ada di klinik dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Selain itu, telah dibentuk koordinator di setiap kecamatan yang berperan dalam pembentukan kelompok-kelompok UMKM. Klinik juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bagi pelaku UMKM yang telah terdaftar serta menyediakan layanan konsultasi. Salah satu kegiatan rutin yang telah berlangsung sejak tahun 2017 adalah sosialisasi "Sedekah Ilmu," yang bertujuan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Kedua, dalam aspek sumber daya, terdapat dua komponen utama, yaitu sumber daya manusia dan anggaran. Klinik KUM hanya memiliki dua tenaga kerja, yang menjadi tantangan dalam menjalankan program secara optimal. Dari sisi anggaran, pendanaan untuk program ini hanya tersedia hingga tahun 2021, sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan klinik. Ketiga, dari aspek disposisi, meskipun tugas dan fungsi telah dibagi sesuai peran masing-masing, masih terdapat kendala teknis dan administratif di lapangan. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain kesulitan operator dalam mengelola data, keterbatasan keterampilan dalam mengoperasikan sistem digital, serta lambatnya sistem dalam pengurusan beberapa layanan di klinik. Hal ini berdampak pada proses pelayanan yang menjadi lebih lambat dan membutuhkan waktu lebih lama. Keempat pada aspek struktur birokrasi, program Klinik KUM telah disusun dengan sistem yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga prosedur layanan sudah berjalan efisien. Implementasi struktur birokrasi dalam program ini mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan.

# REFERENSI

- [1] E. Sartika and A. Suryani, “Pengaruh Umkm Terhadap Pendapatan Nasional Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2014-2018,” *J. Saintika Unpam J. Sains dan Mat. Unpam*, vol. 3, no. 2, p. 122, 2021, doi: 10.32493/jsmu.v3i2.7414.
- [2] K. W. A. Damayanti, “Evaluasi Penerapan Layanan Klinik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung,” *Repos. Politek. Negeri Bali*, 2022.
- [3] L. M. Hamzah and D. Agustien, “Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Pendapatan Nasional pada Sektor UMKM,” *J. Ekon. Pembang.*, vol. 8, no. 2, pp. 215–228, 2019.
- [4] Suyadi, Syahdanur, and S. Suryani, “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau,” *J. Ekon. KIAT*, vol. 29, no. 1, 2018.
- [5] I. W. K. Suwastika, M. S. Kase, N. Bayti, and D. Wangania, *Kewirausahaan di Era Digital: Berinovasi dan Bertumbuh dalam Dunia Teknologi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- [6] P. F. Drucker, *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. New York: Perennial Library, 1986.
- [7] A. Manap, *Manajemen Kewirausahaan Era Digitalisasi*. Jaakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2021.
- [8] S. Vinatra, A. Bisnis, U. Veteran, and J. Timur, “Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat,” *J. Akuntan Publik*, vol. 1, no. 3, pp. 1–08, 2023, doi: 10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832.
- [9] P. Delfyrah, K. O. Zakin, M. A. Zibran, M. H. Fikri, and M. Sannia, “Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM : Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan,” no. 2, pp. 1–7, 2024.
- [10] B. Ananda Kurniawan, “Upaya Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Dalam Membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Era Modern,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, pp. 1696–1704, 2024.
- [11] N. Nada Hidayah and H. Sukmana, “Analysis of Corporate Strategy in The Development of Micro, Small, and Enterprises (MSMEs),” *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 17, pp. 1–11, 2022, doi: 10.21070/ijppr.v17i0.1249.

# REFERENSI

- [12] F. A. Muhammad Fadhil Ridho, “Pengembangan Usaha UMKM Melalui Optimalisasi Penggunaan dan Pengelolaan Digital Pasca Pandemi Covid-19,” pp. 1–7, 2022, [Online]. Available: <https://himie.umsida.ac.id>[13] D. Damayanti, “Strategi branding klinik Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) melalui kelompok arisan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo,” *Repos. Univ. Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- [14] M. E. L. Astono, M. Ogotan, and B. Kiyai, “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat di Kecamatan Tuminting Kota Manado,” *Anal. pendapatan dan tingkat Kesejaht. rumah tangga petani*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
- [15] F. Fahrezi, M. Rifai, and G. Argenti, “Implementasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program Pelatihan dan Bantuan Alat,” *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 2, pp. 4008–4012, 2022.
- [16] A. AS, “Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Maros,” *Repos. Univ. Muhammadiyah Makasar*, 2019.
- [17] Bogdan and Biklen, *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2016.
- [18] E. G. Mazey III, *Public Policy Implementing*. London - England: Jai Press Inc, 1984.
- [19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [20] M. B. Miles and A. M. Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.
- [21] S. P. Robbins and T. A. Judge, *Organizational Behavior*, 18th, Glob ed. London: Pearson Education, 2021.
- [22] B. Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- [23] S. A. Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- [24] I. Igrisa, *KEBIJAKAN PUBLIK: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.
- [25] Moekijjat, *Administrasi perkantoran*. Bandung: Mandar Maju, 2008



